

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki keinginan untuk memiliki pemerintahan yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Saat ini, perkembangan akuntansi telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Keyakinan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan perencanaan yang difokuskan pada kebutuhan masyarakat sangat penting. Akuntabilitas dipandang memungkinkan untuk menggerakkan suatu negara menuju pemerintahan yang demokratis dalam kasus di mana pemerintah gagal menawarkan layanan publik secara tertib dan adil. Akuntabilitas pejabat pemerintah mencerminkan tugas mereka untuk membantu warganya. (Rosalia, 2022).

Akuntabilitas kinerja adalah sarana untuk mengungkapkan pencapaian atau kegagalan suatu lembaga pemerintah dalam memenuhi tuntutan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Akuntabilitas kinerja dapat terwujud dengan mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati & Heliana, 2022). Peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah juga berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan daerah harus dikelola secara tepat, transparan, ekonomis dan efisien. Laporan keuangan tersebut menjadi referensi

informasi untuk menetapkan dan menyetujui kebijakan pembangunan dan pertumbuhan wilayah (Fildzah, 2021).

Tren yang menarik di sektor publik Indonesia adalah meningkatnya fokus pemerintah pusat dan daerah pada akuntabilitas publik. Mendorong keterbukaan dan menghasilkan akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan informasi mengenai operasi keuangan dan keadaan pemerintah daerah. Tugas akuntan di sektor publik termasuk menawarkan layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Aksesibilitas pelayanan publik dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kesejahteraan setiap orang dapat terpengaruh jika masyarakat tidak terlayani dengan baik. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sangat penting (Hikmawati, 2022)

Pengawasan internal memiliki tujuan untuk mencegah potensi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Almanda, 2012). Pengawasan internal mencakup berbagai proses seperti audit, evaluasi, tinjauan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan internal memegang peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, bersih, dan bebas dari kegiatan korupsi. Pengawasan internal juga turut mendorong tercapainya cita-cita pemerintahan yang baik. Pengawasan internal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan kesadaran kepada warga negara bahwa hak-hak mereka ditegakkan sebagai pemangku kepentingan. Pengendalian internal suatu lembaga pemerintah juga dapat menentukan apakah lembaga tersebut telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan undang-undang yang relevan. Penerapan pengendalian intern yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah (Fildzah, 2021).

Pentingnya tata kelola keuangan yang efektif sebagai elemen strategis yang harus ditetapkan tidak dapat dilebih-lebihkan. Untuk melakukan hal ini, diperlukan perbaikan institusi dan proses berdasarkan standar, aturan, dan peraturan penyajian keuangan yang sesuai. Cara pemerintah menyajikan atau menyiapkan laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Untuk memastikan bahwa konsumen laporan keuangan memiliki akses ke informasi keuangan yang berkualitas tinggi, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, khususnya yang mengatur akuntansi sektor publik. Ini berusaha untuk menilai tanggung

jawab dan memfasilitasi pilihan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik (Jatmiko, 2020).

Konteks ini, dapat dikemukakan bahwa tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar dapat memenuhi hak-hak publik. Instansi pemerintah perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini diperoleh melalui penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk sektor publik. Kualitas dan integritas laporan keuangan akan berdampak pada kinerja pemerintah yang menyajikan laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merujuk pada standar yang harus terpenuhi dalam penyampaian informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan, laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 harus memenuhi empat karakteristik utama yaitu, relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan dan kemampuan untuk dipahami. Keadaan ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan laporan keuangan yang baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketersediaan laporan keuangan ini menjadikannya sebagai sumber data yang digunakan untuk memilih dan melaksanakan kebijakan pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan daerah di Indonesia membuat setiap daerah harus berkembang dari tahun ke tahun agar dapat mencapai akuntabilitas kinerja

yang baik. Salah satu cara untuk mengembangkan kinerja instansi daerah adalah dengan cara menerapkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan pelayanan publik yang memadai. Akuntabilitas kinerja otoritas publik memiliki peran dalam evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat dipertanggungjawabkan secara memuaskan kepada masyarakat.

Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila telah disajikan dengan baik dan telah dievaluasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan sebagai laporan yang disajikan secara wajar dan berkualitas apabila BPK memberikan penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian”. Undang-undang No.15 Tahun 2004 mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut, terdapat opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu pemeriksa memberikan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat dipercaya tanpa ada pengecualian yang signifikan. Opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu pemeriksa memberikan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi terdapat pengecualian atau ketidaksesuaian yang tidak signifikan (Jatmiko, 2020).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah mengelola sumber daya dan keuangan daerah. Organisasi pengelola

keuangan daerah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan tugas mengurus urusan pemerintahan daerah dan amanat memberikan dukungan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah. Mampu meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen jasa merupakan hal yang sangat penting bagi BKAD sebagai organisasi pemerintah.

Tabel 1.1

Hasil Opini Audit LK pemerintah daerah Kabupaten Sleman

No	Tahun	Opini Audit	Opini Audit
1	2021	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2	2022	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Laporan keuangan Kabupaten Sleman telah mendapatkan laporan audit wajar tanpa pengecualian (WTP), terlihat dari tabel di atas. Laporan keuangan Kabupaten Sleman mayoritas memiliki peringkat WTP. Namun, pada tahun 2022 terdapat pengaduan kasus korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Kabupaten Sleman tepatnya di Desa Caturtunggal, berita tersebut terdapat di kompas.id dan detik.com, ini adalah fenomena yang berkaitan dengan keakuratan dan kualitas pelaporan keuangan.

Fenomena pertanggungjawaban kinerja BKAD yaitu terkait dengan masalah laporan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengalami penurunan di tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2022,

Indikator AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) memiliki target nilai A dengan nilai target 82. Pada tahun 2022, indikator ini mencapai 76,95, masuk dalam kategori BB dengan capaian 93,84%. Anggaran dialokasikan untuk mencapai indikator utama AKIP sebesar Rp 39.805.253.187,00, dan terrealisasi sebesar Rp 30.713.371.233,36, atau sebesar 77,16%.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capain %	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100%	Capaian indikator tetap	B
2.	Imdeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Derah	82,26	83,03	102,19	Nilai indeks meningkat sebesar 0,77 atau 0,94%	82,25
3.	Predikat AKIP	A	BB (76,95)	93,84	Nilai predikat AKIP mengalami penurunan	A(86)

Sumber: BKAD Sleman Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan penurunan AKIP pada tahun 2022. Setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD memperoleh nilai 76,95. Nilai ini termasuk dalam kategori BB. Sementara itu, dalam rencana strategis (renstra) terdapat target nilai A dengan nilai 82. Penilaian ini merupakan hasil evaluasi atas LKjIP) tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022.

Penjelasan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul tentang Pengaruh Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BKAD Sleman.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakanh yaitu:

1. Apakah Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman?
2. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman?
4. Apakah akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Sleman?

1.3 Tujuan peneliti

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan akuntansi sektor publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Sleman.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Sleman.

1.4 Manfaat peneliti

Dengan berpegang pada tujuan penelitian yang telah diterapkan sebelumnya, harapannya adalah bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pembaca mengenai Akuntansi Sektor Publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BKAD Sleman.
2. Sebagai sumber penelitian lebih lanjut sebagai cara untuk memajukan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penulis ingin menggunakan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Sleman. Informasi dan konsep yang mereka peroleh untuk mengatasi masalah saat ini melalui studi mereka.

2. Bagi BKAD

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lembaga instansi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi kinerja serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Peneliti

Peneliti menentukan batasan dalam penelitian ini yaitu akuntansi sektor publik, pengawasan internal, kualitas laporan keuangan dan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKAD Kabupaten Sleman. Data tersebut diperoleh dari BKAD Kabupaten Sleman, dan membagikan kuesioner kepada pegawai BKAD sebagai responden penelitian ini.